



Laporan Kinerja Triwulan 3 BPMP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025

Berikut ini kami sampaikan hasil capaian kinerja pada BPMP Provinsi Sumatera Utara selama triwulan 3 tahun 2025.

A. Progress Capaian Kinerja

Sasaran/Indikator	Target PK	Satuan	Target TW 3	Realisasi
[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen				
[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran	64,06	Persen	0	0
[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan	57,61	Persen	0	0
[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara				
[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik	Sangat Baik	Kategori	-	-
[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A	A	Predikat	-	-

B. Analisis Hasil Capaian Kinerja

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen [IKK 1.1] Persentase satuan pendidikan yang memanfaatkan hasil asesmen tingkat nasional untuk peningkatan kualitas pembelajaran, Target capaian output adalah 22.766 lembaga, dan sampai akhir September 2025 yang sudah terfasilitasi adalah 15.936 lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan triwulan III Tahun 2025, Kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Monev ANBK Jenjang SMA
2. Monev ANBK Jenjang SMP
3. Monev ANBK Jenjang SD

Kendala/Permasalahan



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

1. Kendala dalam kegiatan Monev ANBK jenjang SMA yaitu antara lain: Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas; Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama, Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah.
2. Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SMP antara lain: Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas; Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama; Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah.
3. Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SD yaitu antara lain : Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas; Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama; Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Strategi dalam mengatasi Kendala dalam kegiatan Monev ANBK jenjang SMA yaitu antara lain: Sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan dinas setempat; Untuk Kab/kota yang jauh mempersiapkan keberangkatan lebih awal; Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan
2. Tindak lanjut Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SMP antara lain sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan Dinas setempat; Untuk Kab/kota yang jauh mempersiapkan keberangkatan lebih awal; Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan
3. Strategi dalam mengatasi Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SD yaitu antara lain: - Sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan dinas setempat; Untuk Kab/kota yang jauh mempersiapkan keberangkatan lebih awal; Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan

[SK 1] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen

[IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan

Progress/Kegiatan

Capain kinerja sasaran [SK 1.0] Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas dan Dikmen [IKK 1.2] Persentase daerah (provinsi dan kabupaten/kota) yang memenuhi SPM pendidikan, Target capaian output adalah 22.766 lembaga, dan sampai akhir September 2025 yang sudah terfasilitasi adalah 15.936 lembaga. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan triwulan III Tahun 2025 antara lain:

1. Koordinasi dalam rangka Identifikasi, Verifikasi, dan Validasi Data Anak Tidak Sekolah (ATS).
2. Sosialisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat
3. Strategi Optimalisasi Peran UKS Dalam Mendukung G7KAIH
4. Advokasi dan Workshop Penguatan Ekstrakurikuler Pelaksanaan G7KAIH bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan
5. Monitoring dan Evaluasi Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan
6. Pendampingan advokasi pengumpulan data satuan pendidikan dan koordinasi pemerintah daerah dengan SPPG
7. Sosialisasi Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima BOSKIN Tahun 2025



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

8. Monev ANBK Jenjang SMA
9. Monev ANBK Jenjang SMP

Monev ANBK Jenjang SD

Kendala/Permasalahan

1. Minimnya pemahaman pihak daerah terhadap urgensi pendataan ATS sehingga pelaksanaan verifikasi belum maksimal
2. Dalam kegiatan Sosialisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat Banyak Peserta mengundurkan diri
3. Kendala dalam kegiatan Strategi Optimalisasi Peran UKS Dalam Mendukung G7KAIH yaitu antara lain Partisipasi peserta rendah (tidak hadir, keluar sebelum selesai); Materi terlalu teoritis, tidak aplikatif di satuan pendidikan; Kendala dalam komunikasi atau manajemen waktu saat webinar (misal: diskusi molor, moderator pasif).
4. Kendala dalam kegiatan Advokasi dan Workshop Penguatan Ekstrakurikuler Pelaksanaan G7KAIH bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan yaitu: Peserta tidak hadir sesuai target, Keterlambatan narasumber, Gangguan teknis (sound, LCD, listrik), Materi tidak sesuai ekspektasi peserta, Ketidakhadiran peserta dari instansi kunci, Kegaduhan atau kurangnya partisipasi, Keterbatasan waktu diskusi dan workshop, Respon negatif terhadap kebijakan G7KAIH, Kegagalan dokumentasi kegiatan, Risiko kesehatan peserta, Pembayaran Uang Transport Peserta Terkendala
5. Kendala dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan yaitu antara lain; Kurangnya data feed-back dari Kepala Sekolah maupun ; Kurangnya data feed-back dari siswa; Data palsu atau jujur rendah; Petugas evaluator tidak kompeten atau bias; Tertundanya pengumpulan atau laporan Monev; Hasil evaluasi tidak dipakai atau tidak diimplementasi; Sistem survey digital gagal / data hilang
6. Kendala dalam kegiatan Pendampingan advokasi pengumpulan data satuan pendidikan dan koordinasi pemerintah daerah dengan SPPG yaitu Proses Birokrasi dalam mengundang Pihak Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai Narasumber sangat kompleks.
7. Kendala dalam kegiatan Sosialisasi Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima BOSKIN Tahun 2025 yaitu antara lain Belum semua satpen dan Dinas Pendidikan memahami tentang Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima BOSKIN; Sarpras yang belum sepenuhnya mendukung penerapan Koding dan Kecerdasan Artifisial; Belum semua SDM dari satpen mendapatkan pelatihan tentang Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial
8. Kendala dalam kegiatan Monev ANBK jenjang SMA yaitu antara lain: Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas; Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama, Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah.
9. Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SMP antara lain: Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas; Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama; Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah.
10. Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SD yaitu antara lain : Pemilihan sekolah sasaran yang melaksanakan AN yang sesuai dengan tanggal surat tugas; Daerah sasaran yang jauh dan membutuhkan waktu keberangkatan yang lama; Kurangnya keahlian petugas menggali informasi yang diinginkan dalam hal wawancara kepala sekolah

Strategi/Tindak Lanjut

1. Status data ATS tidak dapat dipastikan, sehingga perlu terus melakukan pendampingan dan monitoring optimalisasi verval data ATS
2. Untuk mengatasi banyaknya peserta yang mengundurkan diri dalam Sosialisasi Gerakan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, berkoordinasi dengan dinas Pendidikan untuk mencari peserta pengganti.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

3. Untuk mengatasi kendala dalam kegiatan Strategi Optimalisasi Peran UKS Dalam Mendukung G7KAIHLakukan publikasi dan undangan lebih awal; Kolaborasikan teori dengan praktik baik/laporan praktik peserta; Siapkan moderator yang berpengalaman.
4. Strategi dalam mengatasi Kendala dalam kegiatan Advokasi dan Workshop Penguatan Ekstrakurikuler Pelaksanaan G7KAIH bagi Pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan Reminder via WA/email yaitu antara lain: Menyiapkan narasumber Cadangan, Menyiapkan teknisi agar selalu standby, Koordinasi dengan narasumber agar materi diberikan dengan lebih sesuai, beri kerangka materi, Koordinasi langsung dengan kepala instansi, kirim surat resmi, Gunakan metode partisipatif: diskusi, tanya jawab, games, Susun rundown ketat, fasilitator arahkan diskusi secara efektif, Siapkan sesi tanya jawab, beri studi kasus praktik baik, Tetapkan tim dokumentasi khusus (foto/video), Siapkan P3K, koordinasi dengan petugas kesehatan local, Mencantumkan persyaratan pembayaran transport pada surat undangan
5. Strategi dalam mengatasi kendala kegiatan Monitoring dan Evaluasi Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah pada Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan yaitu antara lain Sosialisasi tentang SE Mendikdasmen No. 10 Tahun 2025, pentingnya partisipasi dan formulir monitoring elektronik; Sosialisasi tentang SE Mendikdasmen No. 10 Tahun 2025, pentingnya partisipasi dan formulir monitoring elektronik; Gunakan survei anonim digital, fasilitasi diskusi langsung; Pelatihan tim Monev, panduan standar Monev, supervisi sejawat; Timeline jelas (on-going & separate monitoring); Action plan tertulis, review berkala, presentasi ke stakeholder; Backup berkala, pilihan hard-copy fallback, tes sistem sebelum periode Monev
6. Strategi dalam mengatasi kendala Kendala dalam kegiatan Pendampingan advokasi pengumpulan data satuan pendidikan dan koordinasi pemerintah daerah dengan SPPG yaitu Mitigasi yang dilakukan dengan mengkonfirmasi ulang kehadiran narasumber H-2 sebelum acara
7. Strategi dalam mengatasi Kendala dalam kegiatan Sosialisasi Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima BOSKIN Tahun 2025 yaitu antara lain: Satpen dan Dinas pendidikan telah mendapatkan pemahaman tentang Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima BOSKIN; Sebagian SDM telah dilatih tentang Pembelajaran Mendalam, Koding dan Kecerdasan Artifisial Bagi Dinas Pendidikan dan Sekolah Penerima BOSKIN
8. Strategi dalam mengatasi Kendala dalam kegiatan Monev ANBK jenjang SMA yaitu antara lain: Sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan dinas setempat; Untuk Kab/kota yang jauh memepersiapkan keberangkatan lebih awal; Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan
9. Tindak lanjut Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SMP antara lain sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan Dinas setempat; Untuk Kab/kota yang jauh memepersiapkan keberangkatan lebih awal; Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan
10. Strategi dalam mengatasi Kendala dalam kegiatan Monev ANBK Jenjang SD yaitu antara lain: - Sekolah yang dipilih dilihat dari web ANBK dan berkoordinasi dengan dinas setempat; Untuk Kab/kota yang jauh memepersiapkan keberangkatan lebih awal; Untuk sesi wawancara disertakan konteks jawaban yang diharapkan dan Guidance to in-depth pada setiap butir pertanyaan wawancara sehingga dapat membantu petugas melakukan pendalaman terhadap pernyataan responden dengan memberikan pertanyaan tambahan sesuai kebutuhan

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara

[IKK 2.1] Capaian Nilai Kinerja Anggaran BPMP Provinsi Sumatera Utara dengan kategori sangat baik

Progress/Kegiatan

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPMP Provinsi Sumatera Utara akhir bulan September



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

Tahun 2025 adalah 98,00. pada triwulan III tahun 2025 7 indikator penilaian IKPA BPMP Provinsi Sumatera Utara, 2 indikator dibawah nilai 100 yaitu:

1. Indikator deviasi dalam DIPA III bernilai 92,17
2. Penyerapan anggaran bernilai 95,88

Kendala/Permasalahan

Kendala permasalahan

1. Adanya Pencadangan Belanja Kementerian pada Satker yang sampai saat ini belum tau kapan akan dibuka Blokir AA sebesar Rp14.367.136.000,-. Adanya dana blokir ini menjadi beban pada ketercapaian target realisasi anggaran pada BPMP Provinsi Sumatera Utara.
2. Penyerapan anggaran yang tidak sesuai dengan proyeksi yang telah disusun untuk semester III tahun 2025 karena adanya pergeseran jadwal kegiatan dari yang beberapa merupakan kegiatan prioritas harus segera dilaksanakan dan akibat adanya Blokir AA yg sampai saat ini belum pasti kapan akan dibuka sehingga berpengaruh terhadap rencana penarikan dana tiap bulannya

Strategi/Tindak Lanjut

1. Mengoptimalkan penyerapan anggaran dan tetap berkoordinasi dengan Tim TP Prioritas terkait pelaksanaan kegiatan.
2. Mengupayakan agar penyerapan anggaran sesuai dengan Proyeksi Halaman DIPA

[SK 2] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara

[IKK 2.2] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A

Progress/Kegiatan

Nilai SAKIP BPMP Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2024 yaitu 82,5 dan mendapatkan predikat A atau memuaskan. Hal ini menggambarkan bahwa BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4 dan kelompok kerja. Untuk meningkatkan capaian kinerja [SK 2.0] Meningkatnya tata kelola BPMP Provinsi Sumatera Utara [IKK 2.1] Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPMP Provinsi Sumatera Utara minimal A, Pada triwulan III Tahun 2025 ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yaitu :

1. Telah dilaksanakan Penyusunan PK Awal tahun 2025 sesuai petunjuk Biro Perencanaan dan Penganggaran.
2. Telah disusun SKP berdasarkan PK Awal tahun 2025 yang telah disusun
3. Telah dilaksanakan Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Triwulan 3
4. Telah dilaksanakan evaluasi program kerja mingguan setiap hari senin.

Kendala/Permasalahan

1. Renstra Kementerian baru saja terbit pada bulan September, sehingga penyusunan PK untuk eselon 1 dan UPT satker di daerah baru dimulai pada akhir September 2025.
2. Keterlambatan pengumpulan data capaian kinerja dari masing-masing penanggungjawab kegiatan.
3. Belum semua pegawai memahami keterkaitan antara PK dan SKP, sehingga penyusunan tidak konsisten.

Strategi/Tindak Lanjut

1. Segera Menyusun draf renstra UPT yang dapat dijadikan dasar pengukuran kinerja.



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE



**Balai Besar
Sertifikasi
Elektronik**

2. Memberikan sanksi pada penanggungjawab kegiatan yang terlambat membuat laporan kegiatan.
3. Membuat kegiatan sosialisasi penyusunan SKP berdasarkan PK kepala yang telah disusun.

C. Realisasi Fisik dan Anggaran per-Rincian Output

No	Rincian Output	Satuan	Fisik		Anggaran		
			Target	Realisasi	Alokasi	Realisasi	%
1	[DI.7605.QDB.750] Satuan PAUD Dikdas Dikmen dan Dikmas yang difasilitasi penjaminan mutunya	Lembaga	15936	13659	Rp12.507.722.000	Rp8.151.767.425	65.17
2	[WA.7606.EBA.956] Layanan BMN	Dokumen	0	0	Rp8.000.000	Rp0	0.00
3	[WA.7606.EBA.962] Layanan Umum	Layanan	0	0	Rp290.360.000	Rp116.240.000	40.03
4	[WA.7606.EBA.994] Layanan Perkantoran	Layanan	0	0	Rp26.697.604.000	Rp20.167.876.128	75.54
5	[WA.7606.EBB.951] Layanan Sarana Internal	Unit	0	0	Rp51.640.000	Rp0	0.00
Total Anggaran					Rp39.555.326.000	Rp28.435.883.553	71.89

D. Rekomendasi Pimpinan

1. segera selesaikan penyusunan renstra BPMP Provinsi Sumatera Utara
2. bagi para penanggungjawab kegiatan agar meningkatkan kualitas laporan kegiatan, sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang baik, bagi penanggungjawab kegiatan yang terlambat menyelesaikan laporan kegiatan akan diberikan sanksi.
3. meningkatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan di daerah agar kegiatan dan program BPMP Provinsi Sumatera Utara dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran.
4. dengan adanya evaluasi anggaran agar kiranya semua program kegiatan dapat terselesaikan pada akhir bulan november 2025

Medan, 7 Oktober 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Tajuddin Indris, S.Si., M.T
---	---



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE